

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020** 2011

**TENTANG**

­­­­­

**ALOKASI ANGGARAN SETIAP KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI JENEPONTO**,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 17. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020; 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298); 21. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 18). 22. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 35). |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Alokasi Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten merupakan alokasi anggaran yang di berikan melalui dana APBD dalam rangka pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

**BAB II**

**PENGALOKASIAN DANA KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN**

Pasal 2

1. Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 11.346.000.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah);
2. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan;
3. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini;

Pasal 3

1. Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan ketegori daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Kategori Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kategori perlu ditingkatkan sesuai dengan yang termuat pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
3. Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diberikan kepada setiap Kelurahan sesuai dengan kategori daerah perlu ditingkatkan dengan penetapan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) setiap kelurahan;
4. Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata
5. Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini;

**BAB III**

**PENGALOKASIAN DANA KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Pasal 4

1. Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD ditetapkan sebesar Rp. 5.549.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan pada setiap kelurahan yang diberikan secara merata;
3. Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini;

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR …**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI ANGGARAN SETIAP KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN SUMBER APBD KABUPATEN JENEPONTO**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALOKASI DANA KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI** | | | | | |
| **DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN** | | | | | |
| **BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN JENEPONTO** | | | | | |
| **SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020** | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **NO** | **KECAMATAN/KELURAHAN** | **ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SERTA PEBERDAYAAN MASYARAKAT** | | |
| **SUMBER DANA TAHUN 2020** | | |
| **SUMBER DAU TAMBAHAN** | **SUMBER APBD** | **JUMLAH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **KECAMATAN BINAMU** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Monro-monro | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 2. Kelurahan Panaikang | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 3. Kelurahan Balang Beru | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 4. Kelurahan Bontoa | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 5. Kelurahan Empoang | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 6. Kelurahan Empoang Selatan | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 7. Kelurahan Empoang Utara | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 8. Kelurahan Balang | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 9. Kelurahan Biringkassi | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 10. Kelurahan Pabiringa | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 11. Kelurahan Sidenre | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 12. Balang Toa | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **2** | **KECAMATAN KELARA** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Tolo | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 2. Kelurahan Tolo Barat | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 3. Kelurahan Tolo Utara | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 4. Kelurahan Tolo Selatan | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 5. Kelurahan Tolo Timur | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **3** | **KECAMATAN BATANG** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Togo-togo | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 2. Kelurahan Bontoraya | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **4** | **KECAMATAN TAMALATEA** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Bontotangnga | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 2. Kelurahan Tamanroya | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 3. Kelurahan Tonrokassi | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 4. Kelurahan Tonrokassi Timur | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **NO** | **KECAMATAN/KELURAHAN** | **ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SERTA PEBERDAYAAN MASYARAKAT** | | |
| **SUMBER DANA TAHUN 2020** | | |
| **SUMBER DAU TAMBAHAN** | **SUMBER APBD** | **JUMLAH** |
|  | 5. Kelurahan Tonrokassi Barat | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 6. Kelurahan Manjang Loe | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **5** | **KECAMATAN BONTORAMBA** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Bontoramba | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **6** | **KECAMATAN BANGKALA** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Bontorannu | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 2. Kelurahan Pallengu | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 3. Kelurahan Benteng | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
|  | 4. Kelurahan Pantai Bahari | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **7** | **KECAMATAN BANGKALA BARAT** |  |  |  |
|  | 1. Kelurahan Bulu Jaya | 366,000,000 | 179,000,000 | 545,000,000 |
| **JUMLAH** | | **11,346,000,000** | **5,549,000,000** | **16,895,000,000** |

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**